

## Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Medan

Ahmad Wahyudi Zein<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Sapna Maharani Saragih<sup>3</sup>, Rahmi Sekar Andhini<sup>4</sup>, Khairunnisa<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)

**Abstract.** Using a literature review approach, this research looks at how the public views the accountability and openness of the Medan City Government's budget. The foundation of this research is the idea that openness and responsibility are cornerstones of effective leadership that may boost confidence in government. Finding out how people feel about government transparency and accountability in handling regional budgets is the main goal of the research. An analysis of pertinent literature, documents, and prior research is carried out as part of the methodology, which is known as a literature review. According to the study's results, budget transparency is crucial for establishing public confidence and engagement since it shows how openly the government provides information and the accountability systems are operating. The study's findings highlight the need of holding governments more responsible and transparent in order to foster more responsive and accountable leadership and, by extension, to increase public engagement in tracking how regional funds are being used.

**Keywords:** Budget Transparency, Government Accountability, Medan City Government.

**Abstrak.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk melihat pandangan masyarakat terhadap akuntabilitas dan keterbukaan anggaran Pemerintah Kota Medan. Landasan penelitian ini adalah gagasan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab merupakan landasan kepemimpinan yang efektif yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran daerah merupakan tujuan utama penelitian ini. Analisis pustaka, dokumen, dan penelitian terdahulu yang relevan dilakukan sebagai bagian dari metodologi yang dikenal sebagai kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi anggaran sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan publik karena menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dan berjalannya sistem akuntabilitas. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan untuk mendorong kepemimpinan yang lebih responsif dan akuntabel dan, dengan demikian, meningkatkan keterlibatan publik dalam melacak penggunaan dana daerah.

**Kata kunci:** Transparansi Anggaran, Akuntabilitas Pemerintah, Pemerintah Kota Medan.

### 1. LATAR BELAKANG

Komponen penting dari kepemimpinan yang efektif meliputi keterbukaan terhadap pengeluaran pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pejabat. Agar transparan, informasi keuangan daerah harus dapat diakses, dipahami, dan dipantau oleh publik. Akuntabilitas, di sisi lain, berkaitan dengan tugas pemerintah untuk menggunakan uang publik dengan benar dan menjaganya agar tetap transparan. Di era desentralisasi kekuasaan yang semakin meningkat ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan bekerja untuk meningkatkan standar layanan publik (Masitha &

Mulyadi, 2024). Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia telah berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran melalui berbagai inovasi, seperti penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi (*e-budgeting dan e-reporting*). Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran dan laporan keuangan secara online, sehingga mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Namun, meskipun transparansi telah meningkat, akuntabilitas pengelolaan keuangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan dan keterbatasan pengawasan internal serta partisipasi publik yang belum optimal (Sihite, 2024).

Berbagai penelitian telah menekankan perlunya keterbukaan dan tanggung jawab dalam penganggaran daerah. Beberapa faktor memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi besarnya pemerintah, keakuratan pengungkapan keuangan, atau kematangan e-Government. (Muhammad Fadhly Rizky Octavio, 2022). Namun, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan informasi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses serta memahami informasi tersebut, sehingga persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam (Asri Suwarsih & Ritonga, 2017). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji persepsi masyarakat secara langsung terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini mengandung urgensi karena transparansi dan akuntabilitas yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan dan teknologi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menilai dan merespon keterbukaan informasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penelitian ini ialah guna menggali dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, maupun responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Medan. Latar belakang ini menggabungkan gambaran umum tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas, tinjauan literatur terkait, urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan ketentuan yang diminta. Semua poin didukung oleh hasil riset dan informasi terkini terkait pengelolaan anggaran di Kota Medan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Transparansi Anggaran**

Istilah "transparansi anggaran" mengacu pada gagasan bahwa semua langkah pengelolaan anggaran publik dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penilaian—harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Tujuan keterbukaan ini adalah untuk mengekang korupsi, memenangkan hati publik, dan memudahkan untuk menemukan area di mana anggaran salah kelola. Nordiawan (2012) menyatakan bahwa agar publik dapat melakukan pengawasan dengan baik, transparansi didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang transparan dan jujur (Rospa, 2017). Informasi keuangan harus disajikan kepada publik secara jujur dan transparan, seperti yang ditekankan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Fransisca et al., 2021).

Transparansi anggaran publik tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah diakses, dipahami, dan akurat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan anggaran. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Moh. Hamzah et al., 2024).

Transparansi anggaran adalah prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas dan jujur mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah. Transparansi ini meliputi penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang kebijakan fiskal, alokasi dana, penggunaan anggaran, serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan sumber daya publik, sehingga mereka dapat mengawasi dan menilai penggunaan dana publik oleh pemerintah. Hal ini juga menjamin akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara atau daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Salle, 2017).

Secara lebih rinci, transparansi anggaran mencakup beberapa aspek penting, yaitu keterbukaan informasi anggaran, kemudahan akses masyarakat terhadap dokumen anggaran, kualitas dan kelengkapan informasi yang disajikan, pelaporan penggunaan anggaran secara rutin, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi ini secara terbuka melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Transparansi juga mencakup pelaksanaan kegiatan yang terbuka mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan

pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya sebagai bentuk kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko korupsi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keduanya mengatur keterbukaan anggaran di Indonesia, menekankan pentingnya pemerintah menyediakan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada publik. Dokumen anggaran termasuk Komentar Keuangan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/RAPBD), laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan komentar atas laporan keuangan merupakan bagian dari informasi yang diwajibkan. Standar akuntansi pemerintah juga mendukung keterbukaan ini dengan menetapkan aturan untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat. Digitalisasi informasi anggaran meningkatkan transparansi lebih jauh dengan memudahkan publik dan lembaga pengawas untuk mengakses dan memantau penggunaan uang publik. Dengan mempertimbangkan semua hal, keterbukaan anggaran merupakan landasan tata kelola yang baik karena meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan memastikan bahwa sumber daya negara bagian atau daerah dikelola secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan publik(Jubaedah, 2011).

### **Akuntabilitas Pemerintah**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah guna mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan kepada publik. Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas berkaitan dengan bagaimana birokrasi dapat memenuhi harapan publik melalui penyajian informasi yang terbuka, pelayanan yang memuaskan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan(Sawir, 2017). Akuntabilitas pemerintah adalah kewajiban pemerintah sebagai pemegang mandat publik untuk secara transparan dan jujur mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan kinerjanya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang. Konsep ini menuntut adanya hubungan yang jelas antara pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan dengan masyarakat sebagai pemberi mandat, di mana pemerintah harus melaporkan dan menjelaskan penggunaan sumber daya publik serta hasil pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini tidak hanya mencakup aspek administratif dan keuangan, tetapi juga kinerja dan pelayanan publik yang harus efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat(Maolani, 2023).

Romzek dan Dubnick (1990) mengembangkan model akuntabilitas yang meliputi empat tipe: birokrasi, hukum, profesional, dan politik, yang semuanya bergantung pada kontrol internal dan eksternal terhadap tindakan agen publik. Akuntabilitas publik juga merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan birokrasi untuk memastikan transparansi dan kinerja yang baik. Penelitian oleh Adiwirya dan Sudana (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penganggaran berbasis kinerja, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Aziz et al., 2024).

### **Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas dengan Persepsi Masyarakat**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah menyediakan informasi anggaran secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, masyarakat cenderung mempercayai bahwa pemerintah bertindak jujur dan bertanggung jawab (Haryatmoko, 2011; Porumbescu et al., 2020).

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang baik berhubungan dengan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan anggaran dan peningkatan kepercayaan publik (Penelitian di Sulawesi Tenggara). Selain itu, penelitian di Kabupaten Pamekasan mengungkapkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Studi di Pemerintahan Kota Medan menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Maulana & Lubis, 2020). Penelitian di Kabupaten Deli Serdang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kepercayaan masyarakat (Yurika Aulia et al., 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang berarti data dan informasi dikumpulkan melalui pengumpulan dan analisis berbagai literatur, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur terkait, dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas transparansi anggaran, akuntabilitas, dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur dan dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan.

Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini berhasil mengkaji persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas secara komprehensif berdasarkan data dan literatur yang ada. Hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Secara ringkas, metode penelitian artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pengumpulan dan analisis literatur dan dokumen terkait, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Masyarakat memandang keterbukaan informasi anggaran serta pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah**

Untuk mencapai pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis, masyarakat percaya bahwa tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang daerah dan publikasi informasi anggaran sangat penting. Dengan membuat semua dokumen anggaran tersedia untuk umum, warga negara dapat mengetahui bagaimana pemerintah mereka menggunakan uang pajak, mulai dari perencanaan awal hingga pelaporan akhir. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan, dan anggaran pemerintah kota mencerminkan prioritas-prioritas tersebut.

Berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan persyaratan untuk keterbukaan dan pengungkapan dana pemerintah daerah. Kedua undang-undang ini menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan menyatakan bahwa semua data keuangan daerah, termasuk APBD atau laporan realisasi anggaran, harus dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Pada kenyataannya, semakin banyak pemerintah kota dan kabupaten yang mengandalkan TI untuk membuat anggaran mereka lebih terbuka dan mudah diakses. Sebagai contoh, situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komponen transparansi

anggaran yang memungkinkan masyarakat melihat dokumen anggaran tertentu termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah, APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Transparansi yang lebih efisien dan efektif dapat dicapai ketika masyarakat tidak perlu mengunjungi kantor pemerintah secara fisik untuk mendapatkan informasi; hal ini dimungkinkan melalui akses yang sederhana ini. Situs web resmi Kota Bandung dan forum-forum perencanaan pembangunan mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam memantau keuangan daerah.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat ketika rincian anggaran diumumkan kepada masyarakat, menurut anggota masyarakat. Tingkat keterbukaan anggaran yang lebih baik berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik terhadap pemerintah daerah, menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Pandangan yang lebih baik mengenai transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah muncul sebagai konsekuensi dari rasa memiliki dan kontrol rakyat atas penggunaan uang pembayar pajak. Karena masyarakat dapat memeriksa penggunaan uang publik secara terbuka dan transparan, hal ini menjadi penghalang terhadap korupsi.

Namun masih ada banyak hambatan yang harus diatasi sebelum pembagian informasi anggaran dapat direalisasikan sepenuhnya, terutama dalam hal pemahaman masyarakat mengenai angka-angka tersebut. Masyarakat membutuhkan program pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan anggaran, karena banyak orang yang tidak mengerti bahasa atau tidak tahu cara memahami dokumen anggaran. Selain itu, keterbukaan informasi anggaran di beberapa daerah masih rendah dibandingkan dengan yang diharapkan, oleh karena itu para pemimpin daerah dan pejabat pemerintah perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan sistem layanan publik yang proaktif dan mudah diakses.

Masyarakat juga menuntut adanya sistem yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam membelanjakan uang mereka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberitahu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah meninjau laporan pertanggungjawaban yang disiapkan oleh pemerintah daerah tentang pelaksanaan APBD. Bendahara daerah, dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian negara atau daerah yang ditemukan. Sistem ini menekankan perlunya akuntabilitas publik atau lembaga pengawas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan informasi anggaran harus dibuka kepada publik. Keterlibatan masyarakat dalam

pertumbuhan daerah yang berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang didukung melalui prosedur akuntabilitas yang transparan dan pembagian informasi yang memadai. Diperkirakan bahwa pemerintah daerah akan terus meningkatkan jumlah dan kualitas informasi yang mereka publikasikan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memantau pengelolaan keuangan mereka.

### **Keterbukaan Informasi dan Persepsi Masyarakat**

Keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemerintah sebagai pelayan masyarakat wajib menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami makna dan pentingnya keterbukaan informasi ini, sehingga partisipasi dan pengawasan publik terhadap pemerintah belum optimal (Cahyaningtyas, 2017). Keterbukaan informasi bukan hanya soal penyediaan data, tetapi juga bagaimana masyarakat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini mendorong terbentuknya persepsi positif terhadap pemerintah yang transparan dan akuntabel (Zainal et al., 2024).

Transparansi anggaran publik adalah salah satu bentuk keterbukaan yang sangat penting karena menyangkut pengelolaan dana publik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Semakin terbuka pemerintah dalam menyediakan informasi anggaran, semakin besar kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah mengelola dana publik dengan jujur dan bertanggung jawab. Transparansi anggaran memungkinkan masyarakat untuk memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik secara langsung, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi peluang korupsi (Sangki et al., 2017).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, terutama dalam pengelolaan sumber daya publik. Mekanisme akuntabilitas yang efektif membutuhkan keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas dan pemberi masukan (Novitasari & Amanah, 2016). Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan memperkuat akuntabilitas dan transparansi karena warga dapat menuntut pertanggungjawaban pejabat publik, mengawasi penggunaan anggaran,

serta memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Transparansi anggaran berperan penting dalam membangun kepercayaan publik karena memberikan bukti nyata bahwa pemerintah bertindak terbuka dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan, seperti pengawasan anggaran, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan bersama. Ketika masyarakat merasa informasi anggaran tersedia secara jelas dan dapat diakses, mereka lebih termotivasi untuk ikut serta dalam berbagai forum dan mekanisme partisipasi. Sebaliknya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas akan menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan apatisme masyarakat terhadap pemerintah.

Tingkat keterbukaan informasi yang disediakan pemerintah, khususnya transparansi anggaran, sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Mekanisme akuntabilitas yang berjalan dengan baik, didukung oleh keterbukaan informasi, mampu membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, transparansi anggaran bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang responsif, akuntabel, dan demokratis.

### **Peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan**

Komponen utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif di Kota Medan adalah meningkatkan tingkat keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak dan hasil kebijakannya, sedangkan transparansi adalah praktik menyediakan informasi pemerintah yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Bersama-sama, kedua prinsip ini menyediakan dasar bagi pemerintah yang efisien, transparan tentang pengeluarannya, dan mampu melibatkan warganya dalam mengawasi dana daerah.

Pertama, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di Kota Medan sudah mengalami kemajuan signifikan dengan penerapan sistem informasi berbasis teknologi, seperti e-budgeting dan e-reporting, yang memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran dan laporan keuangan secara online. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui alokasi dan realisasi anggaran daerah secara terbuka, sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Namun, tantangan utama masih ada pada rendahnya

pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang disediakan, sehingga literasi keuangan publik perlu ditingkatkan agar transparansi ini dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh warga.

Kedua, akuntabilitas pemerintah Kota Medan juga perlu diperkuat melalui pengawasan internal yang efektif dan keterlibatan lembaga legislatif seperti DPRD Sumatera Utara. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari pembahasan, persetujuan, hingga evaluasi pelaksanaan anggaran. Fungsi pengawasan DPRD ini memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat, serta mencegah penyimpangan yang merugikan daerah. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) juga menjadi strategi utama dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, dengan meminimalisir risiko penyimpangan dan memperkuat mekanisme pengawasan internal (Zackya et al., 2025).

Ketiga, Dengan membuat proses lebih terbuka dan akuntabel, kita dapat meningkatkan tata kelola dan melibatkan lebih banyak orang dalam mengawasi keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pemantauan pelaksanaan anggaran, umpan balik, dan pelaporan penyalahgunaan dapat dilakukan dengan informasi yang transparan dan mudah dipahami yang dapat diakses oleh semua orang. Keterlibatan publik semacam ini meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan daerah dan berfungsi sebagai pemeriksaan sosial untuk memastikan pemerintah melayani kepentingan terbaik masyarakat (Aprilla et al., 2024).

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, seperti aplikasi SIBISA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui kemudahan akses informasi dan pelacakan dokumen. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan dan koordinasi yang optimal yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berfungsi maksimal.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kota Medan merupakan upaya strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah secara efisien dan tepat sasaran, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkeadilan sosial.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel, Pemerintah Kota Medan harus lebih terbuka dan transparan. Dengan menggunakan teknologi informasi,

informasi anggaran dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pengawasan internal dan fungsi DPRD semakin meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, warga negara dapat ikut berperan dalam penggunaan dana daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan informasi yang disediakan pemerintah serta efektivitas mekanisme akuntabilitas yang dijalankan. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran berperan penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat, namun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan dan kurang optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari literatur dan dokumen terdahulu, sehingga tidak dapat menggambarkan secara langsung dinamika persepsi masyarakat di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris dengan pengumpulan data primer agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya, sekaligus mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4).
- Asri Suwarsih, & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wensite Pada Pemerintah Daerah di Sumatra. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1).
- Aziz, N. J. A., Anggraini, W. A., & Pradani, T. (2024). Kajian Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Dalam Menilai Kinerja Pemerintahan Desa. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(1), 109–117. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i1.301>

- Cahyaningtyas, G. K. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Semarang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Jubaedah, E. (2011). Implementasi kebijakan transparansi keuangan di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(34), 288–299.
- Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnal.dialektika.com/>
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran di Sulawesi Tenggara. *IJMA (Internasional Jurnal of Management and Accounting)*, 5(2), 226.
- Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4 Nomor 1(2655-187X), 1–14.
- Moh.Hamzah, Surahman, F., Abdurahman, Imam, A., Saputri, E., & Basyarahil, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business*, 5(2), 199–221.
- Muhammad Fadhly Rizky Octavio. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi)*. Tesis Pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Novitasari, D., & Amanah, L. A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12).
- Rospa. (2017). *Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Asas Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*. Skripsi Pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10–18.
- Sihite, M. (2024). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(11), 169–174.
- Yurika Aulia, Deana Sari Br Hasibuan, Hetri Waruwu, Priska Devriski Gulo, & Silvia Nurhaliza. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>
- Zackya, K. M., Lubis, H., Yudi, M., Saskia, F., & Bunga, B. (2025). Peran Sistem Pengendalian

Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3(1), 366–372.

Zainal, A. S., Riston G. Ahmad, Dian Arwulan, Musridwan, & Mulyawan. (2024). Persepsi Stakeholder Terhadap Keterbukaan Informasi Dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 6(3), 1202–1214. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.309>